

**DEPENDENSI KELUARGA PENERIMA BANTUAN
SOSIAL PEMERINTAH**

SKRIPSI



Oleh :

Mahar Aguzt Purnomo

190810514

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI S1
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh banyak negara tidak hanya di Indonesia saja, bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat serta negara di Benua Eropa juga memiliki permasalahan kemiskinan (Lingga Tawakal, 2020). Menurut Suharto (2009) mengutarakan bahwa kemiskinan memiliki banyak makna. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara ini, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022). Kenyataan ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan juga keterlibatan dari berbagai macam sektor dalam

usaha untuk menanggulangi kemiskinan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Berbagai macam program Pemerintah sudah dilakukan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan (Ahmad Subhan, 2011).

Hierarki kebutuhan menurut Maslow yang terdiri dari kebutuhan berjenjang mulai dari kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang diantaranya adalah kebutuhan makan, minum, bernafas, dan lain-lain, yang kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan rasa aman yang meliputi bebas dari rasa sakit, teror, ancaman dan lain-lain. Lalu disusul dengan kebutuhan sosial yang merupakan kebutuhan agar dapat diterima oleh orang-orang. Selanjutnya kebutuhan *esteem* yang merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan kebutuhan terakhir yaitu Aktualisasi Diri yang merupakan kebutuhan individu untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya (Sumarwan,2011). Oleh sebab itu penting bagi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka disebabkan karena kemiskinan. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat mengentaskan kemiskinan dengan membantu mencukupi kebutuhan dasar manusia.

Di Indonesia terutama untuk penanganan prasejahtera diantaranya RTLH, RS-RUTILAHU,KUBE, PKH, KIP, KIS, Kartu Tidak Mampu, BLT/BST, RASTRA, PBI, program satu juta rumah, subsidi bunga untuk usaha mikro dan kecil, dan sebagainya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara (Firda Wiku, 2020). Penyelenggaraan BLT sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan

langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS). Program BLT ini dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), dengan tujuan mendorong perekonomian masyarakat miskin, membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang secara konsisten dapat memperhatikan masyarakat miskin termasuk RTS (Akib & Risfaisal, 2016). Salah satu bantuan yang bernilai cukup besar adalah PKH yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, agar harapannya dapat mendorong keluarga miskin untuk dapat memiliki akses serta memanfaatkan layanan sosial pangan, pendidikan, kesehatan juga program perlindungan lainnya.

Namun seiring dengan perkembangan waktu, bantuan PKH memunculkan berbagai polemik, seperti penerima bansos cenderung tidak memiliki beban atau tekanan ekonomi yang sama untuk bekerja seperti sebelum mendapatkan program bantuan sosial PKH tersebut sehingga mengakibatkan berkurangnya kemandirian dan memperkuat akar kemiskinan. Selain itu pemberian PKH tersebut juga dianggap sebagai faktor yang mendorong kemiskinan karena memberi penghargaan kepada orang yang tidak bekerja dan tidak menabung, sehingga memunculkan fenomena ketergantungan terhadap bansos yang disampaikan oleh Menteri Sosial sehingga diperlukan usaha untuk memutus siklus ketergantungan (Prihatin,2024). Salah satu contoh yang terjadi berdasarkan study preeliminary yaitu adanya masyarakat yang semula bekerja selama lima jam perhari dengan mendapatkan upah sebesar Sembilan Ratus ribu Rupiah per bulan, memutuskan untuk tidak bekerja dikarenakan sudah mendapatkan bantuan PKH yang sama nilai dananya

sama dengan upah bekerja selama satu bulan yaitu Sembilan Ratus Ribu Rupiah. Subjek tersebut memilih tidak bekerja dikarenakan upah sedikit, dan sudah mendapatkan PKH, daripada bekerja dan mendapatkan hasil dua kali lipat karena mendapatkan PKH. Dari pengalaman ini menjadi salah satu bukti bahwa masih ada orang yang bergantung dengan bantuan sosial.

Salah satu ciri khas mentalitas masyarakat miskin adalah rendahnya tingkat percaya diri dan sikap pasif karena mereka masih beranggapan bahwa untuk menjadi sukses membutuhkan usaha yang tidak mudah dan itu akan menjadi sia-sia sehingga membuat mereka merasa tidak memiliki kendali atas nasib mereka, akibatnya mereka menghindari peluang-peluang baru yang datang kepada mereka karena mereka merasa sudah berada di zona nyaman dan menyebabkan kemampuan mereka terhambat dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi mereka (Arifin, 2020). Dengan demikian mereka tidak memiliki perencanaan jangka panjang yang pada akhirnya membuat mereka susah untuk keluar dari siklus kemiskinan karena selalu terjebak dalam usaha untuk hidup sehari-hari. Akibat dari siklus untuk upaya mempertahankan kehidupan sehari-hari, mereka membutuhkan bantuan sosial. Mereka mengandalkan bantuan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga bansos dirasa perlu untuk diterima seterusnya.

Ketergantungan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kondisi psikologi Keluarga Penerima Manfaat itu sendiri, dimana masyarakat mulai mengharapkan agar bantuan sosial selalu datang rutin setiap bulan dan mereka layak untuk mendapatkannya secara terus-menerus bahkan hingga tempo yang

lama. Dengan demikian mereka akan dapat menikmati bantuan sosial tersebut, bahkan hingga dapat mencukupi kebutuhan tersier mereka. (Selviana, dkk. 2016). Teori Behaviorisme ialah perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Oleh karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur, dan terencana dapat memberikan pengaruh (stimulus) yang baik sehingga manusia bereaksi terhadap stimulus ini dan memberikan respon yang sesuai. Teori ini digunakan untuk mengetahui respon dan stimulus yang terjadi kepada masyarakat setelah pemerintah mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai.

Sebagai contoh penyalahgunaan bansos adalah penerima bantuan menggunakan bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan sosial seperti membeli gawai terbaru, karena pada saat terjadi pandemi, sebagian besar lini masyarakat menggunakan teknologi online, tidak terkecuali dari segi pendidikan. Untuk itulah, dana PKH seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak dimanfaatkan untuk pemenuhan tersebut. Hal ini tentu dapat memunculkan persepsi masyarakat lain yang tidak mendapatkan bantuan, sehingga dirasa menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial masyarakat. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang dalam kehidupan prasejahtera yang juga belum pernah mendapatkan bantuan sosial merasa cemburu. Akibatnya masyarakat berbondong-bondong untuk menuntut keadilan kepada pemerintah setempat terkait dengan kebijakan pemberian bansos dan tidak sedikit yang melakukan tindakan anarkis menuntut penjelasan dari kebijakan tersebut kepada pemerintah setempat.

Salah satu desa yang mendapatkan bantuan sosial beragam adalah Kelurahan MS, Kota Magelang, yang memiliki total 13 RW dan 75 RT dengan

kepadatan penduduk adalah 8.992 per Maret 2023. Kondisi geografis dari Kelurahan MS yang berada di pusat Kota Magelang, namun memiliki Sumber Daya Manusia yang masih belum dapat memaksimalkan potensi mereka sehingga masih terdapat ratusan keluarga miskin didalamnya. Banyaknya jumlah penduduk membuat Kelurahan MS juga lebih banyak mendapatkan bantuan dibandingkan dengan wilayah lain. Informasi ini didapat dari Hasil Susenas BPS dan dari Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kelurahan MS yang berjumlah 5.081 Jiwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan manfaat yang dicapai adalah sebagai berikut :

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dependensi keluarga penerima bantuan sosial pemerintah.

C. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan agar dalam penelitian ini mempunyai manfaat dalam bidang pendidikan dan sosial serta psikologi baik secara teoritis maupun praktis, dengan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang psikologi pada khususnya dibidang ilmu psikologi sosial yang berkaitan dengan permasalahan dependensi terhadap bantuan sosial pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan dependensi keluarga penerima manfaat terhadap bantuan sosial yang diterima.